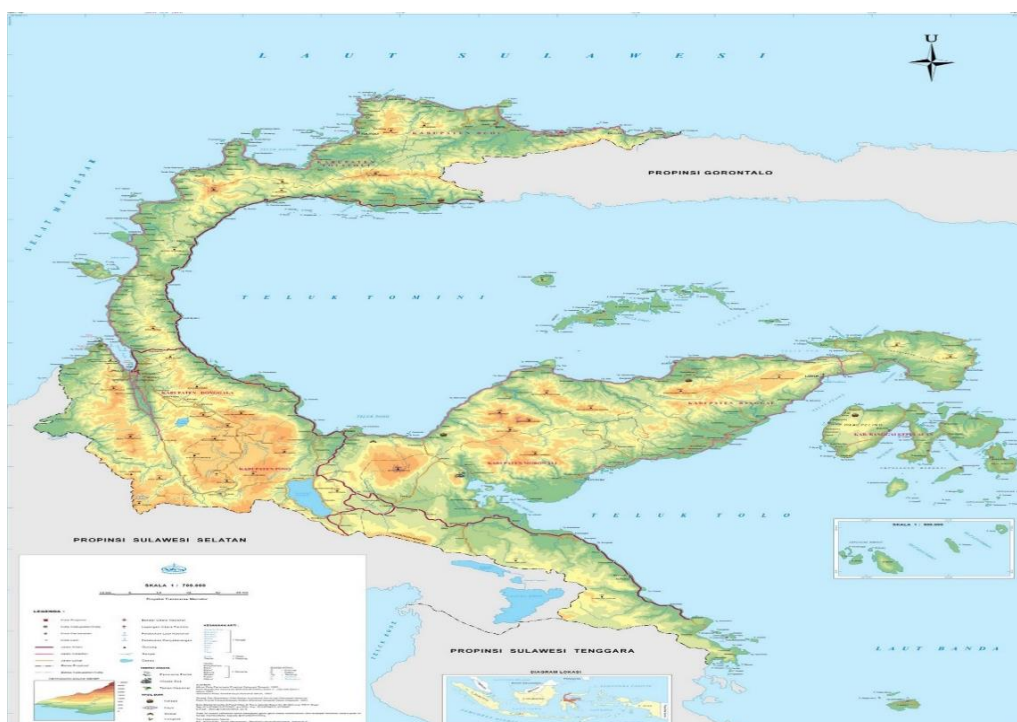


BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Batas Administrasi



Sumber : Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka, 2016

Gambar 4.1

Peta wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi Sulawesi Tengah terletak di Pulau Sulawesi bagian tengah, dibagian utara berbatasan dengan laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo, dibagian selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan, bagian barat berbatasan dengan Selat Makassar, dan bagian Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku.

Provinsi Sulawesi Tengah yang beribukotakan di Kota Palu merupakan provinsi yang dibentuk berdasarkan UU No. 2 Tahun 1964. Secara administratif Provinsi Sulawesi Tengah terbagi dalam 12 Pemerintah Kabupaten dan 1 Pemerintah kota, beserta perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah Kabupaten dan Kota membawahi Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Pemerintahan Kabupaten/Kota tersebut sebagai berikut :

- a. Kabupaten Banggai Kepulauan (Ibu Kota Salakan)
- b. Kabupaten Banggai (Ibu Kota Luwuk)
- c. Kabupaten Morowali (Ibu Kota Bungku)
- d. Kabupaten Poso (Ibu Kota Poso)
- e. Kabupaten Donggala (Ibu Kota Donggala)
- f. Kabupaten Toli-toli (Ibu Kota Toli-toli)
- g. Kabupaten Buol (Ibu Kota Buol)
- h. Kabupaten Parigi Moutong (Ibu Kota Parigi)
- i. Kabupaten Tojo Una-una (Ibu Kota Ampana)
- j. Kabupaten Sigi (Ibu Kota Bora)
- k. Kabupaten Banggai Laut (Ibu Kota Banggai)
- l. Kabupaten Morowali Utara (Ibu Kota Kolonodale)
- m. Kota Palu (Ibu Kota Palu)

2. Kependudukan

Laju pertumbuhan penduduk di Sulawesi Tengah terus mengalami penurunan hingga tahun 2010 dimana periode 2000-2010 laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,95 persen dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 mencapai 2,64 juta jiwa. Kemudian pada tahun 2015 penduduk Sulawesi Tengah meningkat mencapai 2,88 juta jiwa. Ditinjau dari jenis kelamin, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak yaitu sebesar 1,47 juta jiwa sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan sebesar 1,41 juta jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 1004,45.

Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki 2.17 desa/kelurahan dan 6777.382 rumah tangga serta luas wilayah 61.841,29 km² pada tahun 2015 memiliki kepadatan penduduk 47 jiwa per km², 1.426 jiwa per desa, serta 4 jiwa dalam setiap rumah tangga. Kabupaten Parigi Moutong memiliki jumlah penduduk terbanyak yakni 457.707 jiwa atau 15,91 persen dari total penduduk Sulawesi Tengah.

Menurut angka proyeksi penduduk 2010-2015, komposisi penduduk Provinsi Sulawesi Tengah menurut kelompok umur didominasi oleh kelompok usia Balita (Bawah Lima Tahun) yaitu umur 0-4 tahun sebesar 303.369 jiwa. Sedangkan kelompok umur dengan jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu umur 60-64 tahun sebesar 73.298 jiwa.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber keuangan pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan sebagai regulator dalam pelayanan masyarakat. Keberhasilan pemerintah daerah dalam memajukan suatu daerah sangat tergantung kebijakan pengalokasian dana APBD untuk pelaksanaan program-program pembangunan. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, APBD dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen pendapatan daerah sebagai tolak ukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki. Selanjutnya bagian dana perimbangan sebagai komponen terbesar pendapatan daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan daerah tersebut terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan belanja daerahnya. Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dari komposisi belanja daerah, dapat dilihat program prioritas pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

1) Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan data BPS selama tahun 2015, realisasi pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah tercatat sejumlah 2.901,583 miliar rupiah atau meningkat 18,90 persen dari tahun 2014. Pesatnya pertumbuhan tersebut

disebabkan oleh tingginya peningkatan realisasi bagian dana perimbangan sebesar 25,65 persen. Pada periode yang sama Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh sebesar 9,74 persen terutama berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yakni sebesar 112,70 persen diikuti oleh retribusi daerah dengan peningkatan sebesar 43,37 persen. Kontribusi terbesar pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan yakni sebesar 53,69 persen dari keseluruhan anggaran pendapatan daerah, diikuti pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya yang sah masing-masing sebesar 31,19 persen dan 15,13 persen.

2) Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Pada tahun 2015, total realisasi belanja daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencapai sejumlah 2.953,28 miliar rupiah, meningkat 20,76 persen dibandingkan realisasi belanja tahun sebelumnya yang mencapai 2.445,66 miliar rupiah. Sebesar 51,67 persen realisasi belanja tersebut terserap pada belanja tidak langsung atau setara 1.526,08 miliar rupiah, sedangkan sebesar 48,33 persen sisanya terserap pada belanja langsung yaitu sejumlah 1.427,20 miliar rupiah. Porsi belanja pegawai keseluruhan baik yang berasal dari belanja langsung maupun belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah mencapai angka yang cukup besar yakni 22,86 persen atau sejumlah 675,19 miliar rupiah, sedangkan alokasi untuk belanja modal dari total nilai belanja daerah hanya sebesar 14,98 persen atau sejumlah 442,52 miliar rupiah mengalami peningkatan dari sebelumnya yang hanya 9,37 persen atau sebesar 276,831 miliar rupiah.

B. Gambaran Umum Variabel Penelitian

1. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah proses untuk memperluas pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Pembangunan manusia akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat dan panjang umur, untuk berpendidikan dan berkecakupan serta mempunyai pendapatan yang diperlukan untuk hidup.

Secara umum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah dicapai oleh Kota Palu dan diikuti oleh Kabupaten Morowali dan Poso. Sebaliknya pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Tojo Una-Una selama lima tahun terakhir berada di peringkat terakhir. Pencapaian IPM diseluruh Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2015 termasuk dalam kategori “menengah sedang” karena memiliki nilai IPM antara 58-79. Data mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 2011 hingga 2015 disajikan pada tabel 4.1.

Berdasarkan **Tabel 4.1** dapat dijelaskan bahwa perkembangan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sejak tahun 2011-2015, kemajuan yang dicapai Provinsi Sulawesi Tengah dalam pembangunan manusia cukup signifikan. Angka Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan yang cukup berarti pada tahun 2011 sebesar 64,24,

pada tahun 2012 sebesar 64,99, pada tahun 2013 sebesar 65,84, pada tahun 2014 sebesar 66,45, dan pada tahun 2015 juga mengalami peningkatan sebesar 66,97.

Tabel 4.1

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sulteng Tahun 2011-2015

Kabupaten/Kota	Tahun					Min	Max	Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015			
Morowali	66,03	66,48	66,86	67,91	69,12	66,03	69,12	67,28
Poso	65,59	66,2	66,94	67,65	68,13	65,59	68,13	66,9
Donggala	60,15	61,33	63,38	63,55	63,82	60,15	63,82	62,45
Buol	63,03	63,98	64,5	65,41	65,61	63,03	65,61	64,51
Parigi Moutong	60,36	61,13	61,98	62,2	62,79	60,36	62,79	61,69
Tojo Una-una	58,87	59,55	60,32	61,15	61,33	58,87	61,33	60,24
Sigi	61,76	62,88	64,1	64,64	65,35	61,76	65,35	63,75
Kota Palu	78,1	78,36	78,65	79,12	79,63	78,1	79,63	78,77
Sulawesi Tengah	64,24	64,99	65,84	66,45	66,97	64,24	66,97	65,7

Sumber : BPS Sulteng, 2011-2015

Indeks pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Tengah tertinggi dalam kurung waktu 2011-2015 terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 79,63 dan nilai IPM terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 58,87. Apabila dilihat per kabupaten/kota, kota Palu mempunyai angka IPM relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Tengah, sebaliknya nilai IPM terendah terjadi di Kabupaten Tojo Una-una dalam kurung waktu 2011-2015.

2. Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas setiap aspek kehidupan. Kemiskinan bersifat multidimensional, artinya kebutuhan manusia itu bermacam-macam sehingga kemiskinan memiliki banyak aspek. Dari aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi, sosial, politik, pengetahuan, serta keterampilan. Sedangkan dari aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi, dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasi dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik dan tingkat pendidikan yang rendah (Sukirno, 2006).

Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan yang mempunyai pengertian tentang sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Secara sosial psikologi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas.

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi bahkan menempati posisi kedua daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi se-Sulawesi dimana

presentase rata-rata penduduk miskin kota dan desa di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 406.340 jiwa atau sekitar 14,07 persen pada tahun 2015 (BPS, 2016). Berikut data penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 4.2
Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Sulteng
Tahun 2011-2015 (Jiwa)

Kabupaten/Kota	Tahun					Min	Max	Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015			
Morowali	38.800	37.700	35.400	34.000	17.790	17.790	38.800	32.738
Poso	43.000	40.800	41.300	39.600	42.640	39.600	43.000	41.468
Donggala	51.100	48.400	49.600	47.600	54.170	47.600	54.170	50.174
Buol	23.500	22.600	21.600	20.800	24.310	20.800	24.310	22.562
Parigi Moutong	79.100	75.000	75.500	75.000	82.610	75.000	82.610	77.442
Tojo Una-una	31.500	29.900	29.700	27.700	27.620	27.620	31.500	29.284
Sigi	30.800	29.200	27.600	26.500	29.140	26.500	30.800	28.648
Kota Palu	31.800	30.100	25.900	25.700	27.190	25.700	31.800	28.138
Rata-rata	41.200	39.213	38.325	37.113	38.184	35.076	42.124	38.807

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Berdasarkan **Tabel 4.2** menunjukkan bahwa penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 2011-2015 mengalami fluktuatif. Dalam kurun waktu tersebut (2011-2015) penduduk miskin tercatat paling sedikit pada tahun 2015 yaitu sebesar 37.113 jiwa dan penduduk miskin tertinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar 41.200 jiwa. Rata-rata jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 2011-2015 yaitu sebesar 38.807 jiwa.

Apabila dilihat perkabupaten pada tahun 2011, Kabupaten Parigi Moutong memiliki jumlah penduduk miskin paling banyak yaitu sebesar 79.100 jiwa sedangkan Kabupaten Buol memiliki jumlah penduduk miskin paling sedikit yaitu sebesar 23.500 jiwa. Hingga tahun 2015 Kabupaten Parigi Moutong masih menjadi daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin paling banyak yaitu sebesar 82.610 jiwa, hal tersebut menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2015 mengalami peningkatan. Sedangkan jumlah penduduk miskin paling rendah pada tahun 2015 adalah Kabupaten Morowali yaitu sebesar 17.790 jiwa.

3. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

Pengeluaran pemerintah (government expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional (Sukirno,2006).

Pendidikan merupakan salah satu elemen penting pembangunan dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. pendidikan juga berperan penting dalam peningkatan kualitas hidup individu dan masyarakat. semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka akan semakin baik kualitas sumber daya masyarakat. Elemen utama dalam meningkatkan

pembangunan manusia di suatu daerah adalah pendidikan, sehingga peningkatan IPM di bidang pendidikan sangat diperlukan.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki maka akan semakin memudahkan seseorang dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan penyerapan kemajuan teknologi. Fasilitas dan tenaga pengajar yang memadai diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sejauh ini masih berupaya melakukan perbaikan tingkat kesejahteraan salah satunya bidang pendidikan. Pengeluaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.3
Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota
Provinsi Sulteng Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015	
Morowali	181.546	229.170	286.698	165.024	179.207	232.471
Poso	203.523	309.403	292.701	358.316	378.715	268.542
Donggala	253.317	281.470	316.057	334.230	363.932	283.615
Buol	148.604	175.308	181.993	200.566	222.956	168.635
Parigi Moutong	188.299	232.396	208.000	331.149	364.424	209.565
Tojo Una-una	149.387	166.853	183.586	210.563	223.246	166.609
Sigi	171.610	230.435	256.535	266.134	306.070	219.527
Kota Palu	295.732	348.282	426.904	441.784	488.357	356.973
Sulawesi Tengah	199.002	246.665	269.059	288.471	315.863	238.242

Sumber : DJPK Kemenkeu, 2016

Berdasarkan **Tabel 4.3** dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2011-2015 pengeluaran pemerintah bidang pendidikan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan di Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 2011-2015 paling besar terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 315.863 juta, sedangkan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan paling kecil terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 199.002 juta.

Berdasarkan tabel 4.3 rata-rata pengeluaran pemerintah bidang pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 2011-2015 sebesar Rp. 238.242 juta. Kabupaten/kota yang memiliki pengeluaran pemerintah bidang kesehatan paling besar tahun 2015 adalah Kota Palu sebesar Rp. 200.058 juta kemudian disusul oleh Kabupaten sebesar Rp. 378.715 juta, Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp. 364.424 juta, Kabupaten Donggala sebesar Rp. 363.932 juta, Kabupaten Sigi sebesar Rp. 306.070 juta, Kabupaten Tojo Una-una sebesar Rp. 223.246 juta, Kabupaten Buol sebesar Rp. 222.956 juta, dan yang terakhir adalah Kabupaten Morowali sebesar Rp. 179.207 juta.

4. Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan

Pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan merupakan bagian dari anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dari beberapa sektor lainnya untuk memperbaiki fasilitas kesehatan ataupun untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah bidang kesehatan maka kemungkinan masyarakat yang sehat akan semakin banyak.

Keberhasilan pembangunan manusia sangat erat hubungannya dengan kondisi kesehatan. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas kehidupan, meningkatkan usia harapan hidup dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupaya meningkatkan dan memperbaiki saran dan prasarana kesehatan serta tenaga kesehatan yang memadai baik kualitas maupun kuantitas. Upaya ini bertujuan untuk agar pelayanan dan biaya kesehatan mudah dijangkau. Pengeluaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota
Provinsi Sulteng Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015	
Morowali	55.895	79.546	103.606	45.575	69.563	79.682
Poso	63.057	64.900	74.818	75.621	107.214	67.592
Donggala	46.027	48.936	59.524	80.681	941.803	51.496
Buol	40.675	48.228	53.181	61.766	72.801	47.361
Parigi Moutong	51.842	66.153	84.535	123.985	162.696	67.510
Tojo Una-una	45.426	51.099	64.096	83.974	102.597	53.540
Sigi	57.307	44.273	48.552	55.570	64.808	50.044
Kota Palu	86.148	112.120	228.968	178.179	200.058	142.412
Sulawesi Tengah	55.797	64.407	89.660	88.169	215.193	69.955

Sumber : DJPK Kemenkeu, 2016

Berdasarkan **Tabel 4.4** dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2011-2015 pengeluaran pemerintah bidang kesehatan secara nominal di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami fluktuatif. Pada tahun 2011 pengeluaran bidang kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 55.797 juta dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 64.407 juta, pada tahun 2013 kembali meningkat menjadi Rp. 89.660 dan pada tahun 2014 turun menjadi Rp. 88.169 juta kemudian pada tahun 2015 kembali meningkat sebesar Rp. 109.240 juta. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan di Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 2011-2015 paling besar terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 109.240 juta, sedangkan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan paling kecil terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 55.797 juta.

Rata-rata pengeluaran pemerintah bidang kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 2011-2015 sebesar Rp. 69.955 juta. Kabupaten/kota yang memiliki pengeluaran pemerintah bidang kesehatan paling besar tahun 2015 adalah Kota Palu sebesar Rp. 200.058 juta kemudian disusul oleh Kabupaten Prigi Moutong sebesar Rp. 162.696 juta, Kabupaten Poso sebesar Rp. 107.214 juta, Kabupaten Tojo Una-una sebesar Rp. 102.597 juta, Kabupaten Donggala sebesar Rp. 94.180 juta, Kabupaten Buol sebesar Rp. 72.801 juta, Kabupaten Morowali sebesar Rp. 69.563 juta, dan yang terakhir adalah Kabupaten Sigi sebesar Rp. 64.808 juta.